

PEREMPUAN PENULIS DAN SEKAT PEMBATASAN DALAM SASRA

Ni Made Purnama Sari

Sastrawan

*Kami bukan lagi
Bunga pajangan
Yang layu dalam jambangan
Cantik dalam menurut
Indah dalam menyerah
Molek tidak menentang
Ke neraka mesti ngikut
Ke sorga hanya menumpang*

(Kutipan puisi Sugiarti Siswadi dengan nama samaran Damaira, 1956).

Saya ingin memulai pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan utama, yang barangkali terkesan teramat besar: apakah yang telah ditawarkan dan dihadirkan oleh perempuan penulis kepada kesusastraan Indonesia?

Kemungkinan jawabannya bisa beragam, mulai dari estetika karya yang menyajikan tema serta kesegaran penggunaan bahasa, jangkauannya yang memperkaya ragam pengucapan, usahanya mendobrak tabu maupun mendekonstruksi nilai norma pada umumnya, serta sebagainya. Kita tentu pula membutuhkan serangkaian penelitian sastra yang komprehensif demi menguraikan pertanyaan ini, termasuk pembacaan-pembacaan mendalam atas karya mereka, sebab kita menyadari betapa kayanya spektrum penciptaan para penulis ini yang sejalan dengan niatan mereka merespons kenyataan pada zamannya.

Kita mengenal beberapa nama perempuan penulis, semisal Nh. Dini, Toety Heraty, Djenar Maesa Ayu, Okky Madasari, Intan Paramaditha, Ratih Kumala, serta nama-nama lain yang bertumbuh sampai kini di berbagai kawasan negeri ini. Demikian pula, terdapat penulis lain dari masa lalu yang terpinggirkan, sekaligus terkuburkan, dikarenakan alasan-alasan yang sebagian besar amat politis, di antaranya Rukiah Kertapati, Sugiarti Siswadi, Suwarsih Djojopuspito, dan seterusnya—dan mereka seluruhnya, baik yang kita kenali ataupun tidak banyak kita ketahui, mencoba mengetengahkan narasi-narasi bandingan atas aneka rupa realitas, baik yang mereka temui maupun tersuratkan dalam karya-karya penulis lainnya.

Melalui tulisan ini saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa karya para perempuan sejatinya sebetulnya upaya mereka dalam meretas sekat dan pembatasan yang selama ini lekat dengan sosoknya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas sosial dan budaya tertentu. Barangkali, di samping jawaban-jawaban di atas, apa yang fundamental dihadirkan para perempuan penulis ini tidak lain ialah sebuah proses negosiasi atau bahkan ‘tantangan’ terhadap segala sistem berpikir serta sistem sosial masyarakat kita.

SEKAT STEREOTIP ESTETIK

Sering kita temui pernyataan bahwa karya perempuan penulis seolah hanya sanggup mengangkat persoalan domestik dan otobiografis dengan pengucapan lembut mempribadi atau dalam emosi yang berlarat-larat—bahkan dianggap sebagai karya yang “menawar duka dan nestapa”. Meskipun kita kesulitan merunut munculnya persepsi ini, namun pendapat tersebut agaknya cukup terlanjur melekat serta menarik batas-batas wilayah kepenulisan yang dapat dieksplorasi; perempuan penulis dinilai lebih terpujikan bila dia mengelaborasi tema-tema keperempuanannya saja, berbeda dengan laki-laki penulis yang dapat dengan leluasa mengulang-alik tematik dan perspektif di antara kedua gender. Lebih jauh, seakan ada jebakan bahwa, untuk terus mengelompokkan dan menyebutkan ‘penulis perempuan’ dalam kategori sastra yang bertemakan isu perempuan akan menyempitkan ruang gerak penulis (Saras Dewi, Makalah *Pengarang Perempuan dan Keadilan Gender*, 2019).

Inilah sekat pertama yang mesti disiasati oleh perempuan penulis sebagaimana yang tecermin dalam banyak karya, sebut saja di antaranya yang ditulis Suwarsih Djojopuspito (1912-1977) dan Nh. Dini (1939-2018). *Buiten het Gareel* (1940) yang lantas diterjemahkan menjadi *Manusia Bebas* (1975) karangan Suwarsih Djojopuspito pada mulanya terinspirasi dari pengalaman pribadinya sebagai perempuan yang selalu berpindah mukim dan menghadapi kelumit persoalan hidup selama masa pergerakan. Meskipun demikian, kisah Sulastri sang tokoh utama tidaklah melulu seputar hari-hari perempuan sebagai seorang domestik, melainkan ditautkan dengan kronik kejadian yang mewakili jiwa zaman kala itu. Novel ini mencoba melepaskan diri dari stereotip penulisan khas perempuan dan ingin menghadirkan semangat perjuangan dalam perspektif yang berbeda, yakni ulang alik antara rumah, pergerakan nasional, dan sekaligus pergerakan perempuan (Aquarini Priyatna dalam makalah *Suwarsih Djojopuspito: Menciptakan Subjek Feminis Nasionalis Melalui Narasi Autobiografis*, 2013).

Alih-alih mengangkat kisah biografis seputar dirinya, buku kumpulan cerpen pertama Nh. Dini, *Dua Dunia* (1956) justru merespons topik yang lebih kompleks seputar perempuan. Kita menemukan narasi istri yang terkhanati dan mengambil sikap untuk mandiri kendati pun persoalan hidupnya sedemikian pelik, atau seorang wanita berdarah priyayi yang memilih keluar dari tembok keraton demi menikahi seorang prajurit dan menolak segala tindak-tanduk nan feodal. Belum lagi tema mengenai perempuan penunggu warung yang menjaga harga dirinya di depan pelanggan laki-laki serta si miskin yang dihadapkan pilihan sulit ‘menjual’ keperawanan adik iparnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Topik-topik ini jelaslah pilihan yang berani, terutama untuk sebuah karya pertama yang lantas meletakkan posisi Nh. Dini dalam kesusastraan Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa perempuan penulis dapat pula dengan jernih merefleksikan realitas sosial yang dijumpainya.

Kedua karya ini adalah sedikit dari permisalan cara perempuan penulis dalam upaya melepaskan diri dari stereotip estetika ini, yang sampai era kini menginspirasi sedemikian banyak pengarang lain dalam proses penciptaannya.

SEKAT TABU

Upaya mempertanyakan nilai dan norma sebenarnya senantiasa dilakukan oleh perempuan penulis. Menariknya, kecenderungan ini seakan bergerak ke arah yang lebih progresif, jika bisa dikatakan demikian. Sebelum Reformasi kita menemukan karya *Pada Sebuah Kapal* (1973) dari Nh. Dini atau *Raumanen* (1977) karya Mariane Katoppo yang berusaha ‘menantang’ kultur patriarkal dan nilai-nilai sosial melalui potret relasi antartokohnya, sementara pasca 1998 kita menjumpai karya-karya Ayu Utami dan Djenar Maesa Ayu yang secara lebih gamblang melawan nilai moral yang dimungkinkan hadir dalam karya sastra, hingga seakan melampaui sekat normatif ketabuan (silakan baca polemik *Sastra Wangi*).

Namun, tabu yang dihadirkan melalui karya perempuan penulis tadi bukan hanya perihal menyetengahkan seksualitas dan tubuh ke dalam teks, melainkan pula menantang konsep-konsep dominan terkait perempuan itu sendiri, terutama pada konteks masyarakat patriarkis. Mereka mendobrak norma moral yang tak tertulis di mana perempuan tidak bisa secara otoritatif membicarakan ketubuhannya, pun menurukannya dalam ungkapan-ungkapan serba verbal—lain halnya dibandingkan laki-laki penulis di mana segala rupa pengucapan serta tematik ini (bahkan menyangkut ketubuhan perempuan) dapat berterima di masyarakat sastra kita.

Kemunculan ‘gangguan’ ekspresi dari para perempuan penulis ini menerabas pula kekakuan normatif yang selama ini melingkupi ekspresi sastra kita, termasuk perihal apa-yang-pantas ataupun apa-yang-tidak-pantas ditulis oleh perempuan. Stereotip normatif ini, menariknya, juga diterbitkan justru bukan oleh perempuan penulis itu sendiri, akan tetapi dari kalangan laki-laki, sehingga makin memperjelas posisi kesenjangan cara pandang antara perempuan penulis dan laki-laki penulis.

Keberanian melampaui sekat ketabuan ini saya kira membuka jalan baru bagi ekspresi kesusastraan kita sekaligus membuktikan bahwa karya sastra memberikan peluang eksperimentasi agar kita dapat melihat fenomena maupun peristiwa dengan cara yang berbeda.

SEKAT IDENTITAS

Kadangkala karya sastra memang berangkat dari tema-tema personal, baik terkait pengalaman pribadi ataupun kondisi sosial budaya yang akrab dengannya. Walau begitu, benang merah interpretasi dengan konteks yang lebih luas tetap dimungkinkan sebab bukankah tidak ada karya apapun yang bermula dari sesuatu yang kosong dan hampa? Artinya, kita masih bisa menemukan pertautan imaji-imaji sosial dari penuturan yang sepiantas tampaknya mempribadi, seperti ketika kita membaca puisi-puisi Cynthia Hariadi (2016) mengenai figur ibu dalam pengertian domestik maupun konstruksi sosialnya.

Ada pula perempuan penulis yang secara sadar melewati sekat-sekat identitas personalnya, entah sebagai wanita ataupun sebagai bagian dari kultur tertentu. Roman *Isinga* (2015) karya Dorothea Rosa Herliany yang membahas perihal kehidupan Papua setidaknya mencerminkan silang identitas dalam karya. Atau bagaimana Okky Madasari dalam novel-novelnya secara sengaja

menyiratkan empati bagi kalangan-kalangan marjinal semisal LGBT (*Pasung Jiwa*, 2013) dan Ahmadiyah (dalam novel *Maryam*, 2012). Apa yang mereka tuliskan mencoba menepis anggapan bahwa tidak sebagaimana eksplorasi obyek tematik laki-laki penulis, para perempuan penulis kita belum sanggup menyajikan karya yang merespons ragam budaya lain, sejarah lain, ataupun bangsa lain berikut problematikanya.

Pilihan mengangkat tema di luar kondisi personalnya ini sekaligus juga mendudukan posisi perempuan penulis dalam alam kosmopolitan yang cair dan terbuka. Mereka menyadari peran sosiologisnya sebagai warga yang lintas batas pun lintas identitas di masa kini, sejalan itu mereka menyuarakan perlawanan terhadap diskriminasi kelompok terpinggirkan, serta mengedepankan perjuangan akan kesetaraan. Walau acap pula usaha-usaha ini dipandang bias serta sebelah mata dengan alasan kurang utuh merepresentasikan permasalahan entitas bangsa budaya yang dibahas, seakan-akan tidak ada yang lebih sah menghadirkan suara mereka selain dari kalangan bangsa dan budaya bersangkutan.

SEKAT KETERBACAAN KARYA

Belum lama publik sastra Indonesia ‘digegekan’ oleh salah satu penghargaan sastra dari sebuah lembaga yang sama sekali tidak menyertakan karya-karya perempuan penulis sebagai nominasinya. Terlepas dari penilaian dan pilihan juri, kejadian ini memantik sederet pertanyaan, mulai dari obyektifitas kurasi sampai akses keterbacaan karya-karya perempuan penulis—poin yang kedua ini mau tidak mau mesti menyinggung persoalan-persoalan struktural (kondisi geografis, ketimpangan sosial-ekonomi berbagai daerah) dan sistemik seperti persebaran distribusi buku hingga pendokumentasian karya-karya sastra berbagai genre dan gender. Sementara di era kini, dunia yang seakan tanpa batas ternyata tetap menyisakan sekat-sekat tersendiri, terkhusus bagaimana ruang publik digital yang tidak serta merta menawarkan keterbukaan akibat cara pandang untuk menghadirkan karya perempuan penulis belum dipandang urgen dan setara dengan karya-karya penulis lainnya.

Menyikapi fenomena ini, saya mencatat ada kiat dari perempuan penulis dalam menyusun jejaring yang mandiri pun saling mendukung. Salah satu yang perlu diapresiasi ialah program hibah dari Cipta Media Ekspresi pada tahun 2018 yang membantu ekspresi para perempuan berbagai bidang, termasuk kesusastraan, di antaranya mendorong munculnya komunitas menulis yang tersebar di berbagai wilayah serta pendokumentasian karya serta sosok perempuan penulis yang terlupakan. Jejaring-jejaring seperti ini juga bermunculan di kalangan lembaga kampus maupun kelompok yang lebih cair, yang suara-suara mereka cukup teramplifikasi lewat media sosial. Artinya selain berkarya, ada kesadaran dari sebagian kalangan perempuan penulis untuk membangun relasi simbiosis mutualisme—sesuatu yang boleh kita harapkan menjadi cikal-bakal pengorganisasian kepenulisan yang lebih inklusif.

SEKAT YANG LEBIH KUAT

Tidak seluruh upaya melawan sekat ini berhasil. Sejarah pun mencatat bahwa ada perempuan penulis yang terlupakan oleh adanya kekuatan yang lebih besar, dalam hal ini politik dan negara, seperti halnya yang dialami oleh Rukiah Kertapati dan Sugiarti Siswadi. Keduanya adalah perempuan penulis yang cemerlang pada tahun 1950-1960-an namun kemudian namanya terkuburkan lantaran pilihan politiknya yang berseberangan dengan penguasa.

Sugiarti Siswadi merupakan seorang perempuan penulis yang juga aktivis Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA). Kumpulan cerpennya, *Sorga di Bumi* (1960) diberangus dan dilarang beredar lewat instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965. Selaku penyair, perempuan kelahiran Yogyakarta ini menerbitkan beberapa puisinya di *Harian Rakjat* yang tegas berpihak kepada kaum perempuan, dan salah satu sajaknya saya kutipkan pada awal naskah makalah ini. Dia kerap menggunakan nama samaran, di antaranya Damaira. Dia juga seorang penerjemah dan penyadur yang baik, kebanyakan mengalih-bahasakan karya-karya sastra dari negeri sosialis di Eropa dan dimuat dalam majalah *Api Kartini*, sebuah terbitan yang dia kelola bersama beberapa nama, semisal Rukiah Kertapati. Hingga kini tidak ada seorang pun yang mengetahui kisah hidupnya selepas peristiwa geger 1965/1966.

Apa yang dialami Sugiarti Siswadi dan karya-karyanya menunjukkan eksklusi berganda dalam bentuk pelarangan ideologi, sensor karya, pembatasan bahkan pemberangusan aktivisme perempuan, serta yang paling utama: penyembunyian atau penghilangan arsip dan dokumen.

Bukan berarti pula bahwa apa yang dia alami sepenuhnya menjadi masa lalu. Hari ini kita melihat ciri otoritarian ala Orde Baru menyalin diri ke dalam bentuk-bentuk yang lebih mutakhir, merasuk ke dalam sistem berpikir masyarakat kita yang bukan hanya masih patriarkis namun juga melanggengkan pelarangan ide-ide yang berseberangan, sensor isu sosial politik budaya di alam demokrasi, mengguritanya oligarki kekuasaan, persoalan transparansi informasi serta pembatasan aksesnya bagi khalayak, hingga pelarangan hak-hak publik. Bahkan seluruhnya kian menjadi tanpa ketajaman serta kedalaman literasi kita hingga terbentuklah silang sengkabut kabar bohong yang mengaburkan data dan fakta, pun menimbulkan perundungan, termasuk usaha-usaha “membenarkan” keyakinan sendiri.

Semua itu merupakan ancaman, pun juga sekat-sekat lanjutan yang mesti selalu disiasati dan diretas, termasuk pula oleh perempuan penulis. Dalam masyarakat era kini, mestilah disadari bahwa sekat-sekat dan pembatasan yang mengepung ekspresi sastra kita tidak melulu hal yang sifatnya estetik dan eksistensial, namun sekaligus politis. Ini sungguh tidak terelakkan sebab bukankah sejarah menunjukkan bahwa sastra sejatinya tak sekadar perwujudan keindahan, melainkan pula di dalamnya mengandung napas pergerakan yang mewakili jiwa zamannya?